

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas periode 2010-2014. Seluruh kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan. Tujuan yang akan dicapai dalam tahun 2012 adalah: 1) terwujudnya rencana pembangunan nasional (RKP 2013) yang berkualitas; 2) terwujudnya koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya sesuai peran Kementerian PPN/Bappenas; 3) tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas.

Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan rencana kinerja tahunan sebagai penetapan kinerja tahun ke 3 (tiga). Penetapan kinerja tersebut memuat Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2012 yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2010-2014.

Berdasarkan penetapan kinerja tahun 2012 tersebut, Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan **telah menghasilkan rancangan dokumen rencana kerja pemerintah (RKP) Tahun 2013 yang berkualitas**. Rancangan dokumen RKP 2013 tersebut dihasilkan melalui suatu tahapan atau proses penyusunan RKP 2013 yang dimulai dari Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat (Rakorbangpus) termasuk Pra Rakorbangpus, Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Propinsi (Musrenbangprov), Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Nasional (Musrenbangnas), baik Pra Musrenbangnas maupun Pasca Musrenbangnas serta pertemuan lainnya di tingkat teknis baik secara bilateral maupun trilateral. Selanjutnya rancangan dokumen RKP 2013 tersebut menjadi arah kebijakan pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional jangka pendek.

Rancangan dokumen RKP 2013 yang dihasilkan tersebut memiliki Tema "*Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat*" dengan unsur-unsur tema RKP 2013 adalah: 1) Daya saing; 2) Daya tahan ekonomi (*resilience*) perluasan dan peningkatan kesejahteraan rakyat; dan 3) Stabilitas sosial dan politik, dengan didukung prioritas pembangunan nasional sebanyak 14 prioritas nasional.

Disamping itu, Kementerian PPN/Bappenas juga telah menyelesaikan berbagai penugasan lainnya, baik yang diberikan Pemerintah/Presiden dalam rangka peningkatan koordinasi dan kerjasama pembangunan nasional melalui suatu rencana aksi nasional maupun kerjasama pembangunan internasional. Sedangkan dalam kaitan peningkatan kapasitas kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas telah mencapai hasil yang sangat memuaskan khususnya di bidang pengelolaan keuangan serta pengembangan kapasitas kelembagaan dari aspek organisasi, manajemen SDM dan tatalaksana, penguatan akuntabilitas kinerja, pengawasan serta pelayanan, baik secara internal maupun eskternal dalam rangka mendukung tujuan reformasi birokrasi nasional.

Keberhasilan atas pencapaian kinerja tahun 2012 berdasarkan sasaran strategis dari 3 (tiga) tujuan yang telah ditetapkan di atas terlihat pada tabel berikut.

HASIL PENGUKURAN KINERJA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan (Kesesuaian RPJMN dan RKP 2013 dengan Renja dan RKA K/L 2013)	1. % kesesuaian antara muatan rancangan RKP 2013 dengan RPJMN 2010-2014	100%	100%	100
		2. % kesesuaian rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) 2013 dengan rancangan RKP 2013	100%	100%	100
		3. % kesesuaian rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2013 dengan target dan sasaran rancangan RKP 2013	100%	80,30%	80,30
		4. % Sasaran Prioritas Nasional yang telah sesuai dengan rencana	100%	87,77%	87,77
		5. Pendapat <i>stakeholders</i> tentang proses penyusunan RKP 2013	Cukup Baik	Baik	>100
2.	Meningkatnya peran Kementerian PPN/Bappenas terkait koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya	Tingkat keberhasilan pelaksanaan koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya sesuai peran Kementerian PPN/Bappenas	80%	80%	100
3.	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas	1. % pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian PPN/Bappenas melalui penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM	90%	88,3%	98,11
		2. % ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas	100	91,15	91,15
		3. % fasilitasi dan pembinaan SDM aparatur perencana pusat dan daerah	100%	94,60%	94,60
		4. Opini dari BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
		5. Standar penilaian <i>good governance</i>	Baik	Baik	100

Sebagaimana tabel di atas, secara umum Kementerian PPN/Bappenas telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2012, walaupun dari seluruh target yang telah ditetapkan pada tahun 2012 terdapat beberapa target yang belum tercapai secara optimal. Belum optimalnya pencapaian target tersebut disebabkan adanya beberapa faktor masalah dan kendala yang dihadapi di tingkat koordinasi, namun dibandingkan tahun sebelumnya pencapaian tersebut terus mengalami peningkatan kualitas sehingga diharapkan target sampai berakhirnya masa dokumen Renstra 2010-2014 dapat tercapai secara optimal.

Beberapa upaya untuk mendorong optimalisasi peningkatan kinerja Kementerian PPN/Bappenas secara terus menerus adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan peran Kementerian PPN/Bappenas dalam mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan termasuk penentuan sasaran atau target-target yang lebih realistis, dengan mempertimbangkan dinamika perubahan lingkungan strategis nasional dan internasional.
- 2) Terus melakukan peningkatan kompetensi SDM Kementerian PPN/Bappenas agar dapat cepat tanggap dalam memprediksi atau mendeteksi dini (*early warning system*) terhadap perubahan lingkungan strategis nasional maupun internasional, sehingga dapat segera mengambil langkah-langkah antisipatif dalam memecahkan persoalan pembangunan nasional.
- 3) Melakukan perbaikan dan pengembangan kapasitas kelembagaan dalam mendukung Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan value "*Better Performance*" yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Fokus tersebut dilaksanakan melalui upaya perbaikan tata laksana (*business process*), optimalisasi organisasi (*rightsizing*), peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana.